



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN BADUNG

Sri Sulandari^{1*}, I Dewa Gede Putra Sedana²⁾, I Wayan Astawa³⁾

¹Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia
sri.fishumunr@gmail.com

^{1,2}Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia

ABSTRAK

HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan social tidak tetap hingga saat ini, kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya sehingga membutuhkan adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung karena masyarakat akan banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang cermat terhadap fenomena yang terjadi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum terlaksana dengan maksimal. KPA Kabupaten Badung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat penanggulangan HIV-AIDS melalui penyuluhan, kampanye media, medis, realisasi dan sosialisasi mengenai bahaya dari virus HIV-AIDS ini baik dari pihak kesehatan maupun LSM yang dimana dapat membantu peranan pemerintah Kabupaten Badung guna mengatasi penyebaran virus tersebut. Komitmen dari KPA Kabupaten Badung belum mampu berjalan dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penanggulangan HIV-AIDS. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu : kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung, dan kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kaderposyandu).

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Menteri, Penanggulangan HIV-AIDS, Kabupaten Badung

ABSTRACT

HIV/AIDS is an extreme problem that easily moves so that geographically and socially it is not fixed until now, the ease of moving or changing direction is a global picture of this HIV/AIDS epidemic. Therefore, a strategy from various parties is needed to reduce and overcome the spread of HIV/AIDS. Badung Regency is one of the regencies in Bali Province that prioritizes the tourism sector in the economic development of its community so that it requires community empowerment in the context of overcoming HIV-AIDS in Badung Regency because people will interact a lot with tourists, both foreign tourists and domestic tourists. Based on the above explanation, the main problem in



this research is how to implement the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2007 concerning Community Empowerment in the context of overcoming HIV-AIDS in Badung Regency. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2007 concerning Community Empowerment in the context of HIV-AIDS prevention in Badung Regency and to find out the obstacles in implementing the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2007 concerning Community Empowerment in the context of HIV-AIDS prevention in Badung Regency. Badung Regency The approach used in this research is descriptive qualitative with the aim of describing the reality carefully to the phenomena that occur. The results obtained in this study are that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2007 concerning Community Empowerment in the context of HIV-AIDS prevention in Badung Regency has not been implemented optimally. The Badung Regency KPA has made efforts to empower the community to overcome HIV-AIDS through counseling, media campaigns, medical, realization and socialization about the dangers of the HIV-AIDS virus, both from the health side and NGOs, which can help the role of the Badung Regency government to overcome the spread of the virus. The commitment of the KPA Badung Regency has not been able to run optimally due to the low public awareness of HIV-AIDS prevention. This is due to several obstacles related to the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2007 concerning Community Empowerment in the context of HIV-AIDS prevention in Badung Regency, namely: a. Lack of intensive socialization regarding the prevention of HIV-AIDS from the Badung Regency KPA. b. Lack of community empowerment cadres (kaderposyandu).

Keywords: *Implementation of Ministerial Regulations, HIV-AIDS Control and Badung Regency.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang diwujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah melalui upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Masalah kesehatan yang memberikan dampak sosial dapat menjadi kendala pembangunan yang harus segera diatasi. Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya epidemi yang disebabkan HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di dunia. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan turunnya imun penderita sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquire Immunodeficiency Syndrom* (AIDS) merupakan tahapan akhir dari infeksi virus HIV, yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh rusak parah yang disebabkan oleh virus tersebut.

Permasalahan mengenai HIV/AIDS adalah sebuah fakta yang sekarang sedang dihadapi di semua daerah-daerah di Indonesia termasuk Provinsi Bali. HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah dapat menular sehingga secara geografis dan sosial tidak tetap hingga saat ini. Kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya dari berbagai pihak dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Dalam hal ini pemerintah wajib memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk dengan ancaman penularan penyakit.

Kabupaten Badung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali dimana kabupaten Badung menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas sumber pendapatan daerah sehingga membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah, lembaga masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Badung, mengingat kondisi masyarakatnya banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawandomestik. Adapun data mengenai kasus HIV/AIDS

menurut perkiraan factor risiko dan kelompok umur secara kumulatif tercatat dari tahun 1987 hingga 2019 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus HIV-AIDS Menurut Perkiraan Faktor Risiko Tahun 1987-2019

Perkiraan Faktor Risiko	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	% Total
Biseksual	108	0,8	2	0,0	110	0,5
Heteroseksual	8.958	65,3	7.850	94,4	16.808	76,3
Homoseksual	3.217	23,4	30	0,4	3.247	14,7
IDU	801	5,8	58	0,7	859	3,9
Perinatal	358	2,6	256	3,1	614	2,8
Tatto	9	0,1	1	0,0	10	0,0
Tidak diketahui	271	2,0	115	1,4	386	1,8
Total	13.722	100	8.312	100	22.034	100

Sumber : KPA Kabupaten Badung (2020)

Tabel 2. Jumlah Kasus HIV-AIDS MenurutKelompok Umur Tahun 1987-2019

Perkiraan Faktor Risiko	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	% Total
< 1	86	0,6	68	0,8	154	0,7
1-4	270	2,0	185	2,2	455	2,1
5-14	96	0,7	68	0,8	164	0,7
15-19	202	1,5	289	3,5	491	2,2
20-29	4.962	36,2	3.389	40,8	8.351	37,9
30-39	4.933	35,9	2.775	33,4	7.708	35,0
40-49	1.998	14,6	1.051	12,6	3.049	13,8
50-59	834	6,1	347	4,2	1.181	5,4
>60	226	1,6	78	0,9	304	1,4
Tidak diketahui	115	0,8	62	0,7	177	0,8
Total	13.722	100	8.312	100	22.034	100

Sumber : KPA Kabupaten Badung (2020)

Data tersebut dapat dianalisis bahwa faktor-faktor pergaulan yang bebas dan produktifitas hormon yang menunjukkan adanya peningkatan kasus HIV-AIDS secara kumulatif pada tahun 2004-2018 di Kabupaten Badung pada katagori umur 20-29 tahun Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Badung ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS berjalan secara maksimal. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Badung dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat mengenai HIV-AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV-AIDS) ini juga belum berjalan



dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HIV-AIDS, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena yang terjadi untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan fakta yang nampak. Menurut Moleong (2011:6), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Menurut Sugiyono (2011:243), “dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh”. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka analisis data yang digunakan dalam pengolahan data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dalam pengembangan teori berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini

PEMBAHASAN

Analisi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS Di Kabupaten Badung

Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan publik Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS Di Kabupaten Badung dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan adalah Teori Implementasi Merilee S Grindle (1980) dalam Subarsono (2011: 93) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel isi kebijakan mencakup beberapa indikator yaitu :

- a. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.

Penanggulangan kasus HIV-AIDS diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Kerjasama pemerintah dengan masyarakat merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari praktek kerjasama adalah teratasinya sebagian kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, Peran Pemerintah dalam penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Badung menjadi sangat penting guna menekan jumlah penderita HIV AIDS dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, salah satu cara penanggulangan HIV AIDS yang mengedepankan peran serta pemerintah di masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS di Kabupaten Badung.



Strategi itu tentunya memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai tenaga non kesehatan (kader, LSM, KDS, ODHA), sebagai upaya pencegahan HIV dan AIDS. Sama halnya pada pendekatan LKB yang melibatkan masyarakat sebagai upaya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS Di Kabupaten Badung secara politikal di lapangan adalah melalui isu strategis penanggulangan HIV-AIDS yang bertujuan mencegah penularan HIV-AIDS melalui program pemberdayaan masyarakat.

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

Manfaat yang dapat diterima dari menjalankan prinsip-prinsip penanggulangan HIV-AIDS yaitu:

- 1) Transparansi, transparansi yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan:
 - a. Adanya penyediaan informasi baik berupa kejelasan prosedur, kejelasan biaya dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program kegiatan.
 - b. Adanya kemudahan dalam akses informasi baik berupa informasi yang akurat dan tepat waktu serta kemudahan dalam memperoleh data.
- 2) Akuntabilitas, akuntabilitas yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan:
 - a. Adanya keputusan yang tertulis terkait pelaksanaan program.
 - b. Adanya proses perencanaan dan pelaksanaan.
 - c. Adanya akurasi dan kelengkapan informasi dalam kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Partisipatif, partisipatif masyarakat dalam kegiatan ini yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan aparat pemerintah dalam pelaksanaan program.
 - b. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
 - c. Adanya komitmen yang dibangun oleh masing-masing pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- 4) Efektifitas dan efisiensi, dapat dilihat berdasarkan:
 - a. Adanya penggunaan teknologi yang tepat dalam mendukung seluruh proses kegiatan.
 - b. Adanya struktur organisasi yang jelas sehingga tidak melewati batasan kewenangan masing-masing.
 - c. Ketersediaan SDM yang memadai.
 - d. Tercapainya hasil dari program yang telah ditentukan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS bermanfaat agar masyarakat tetap hidup bersih dan sehat serta untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS. Tetapi program ini belum memberikan hasil yang maksimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemerintah dalam mencegah penularan HIV-AIDS.

c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.

Ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak komisi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Badung yaitu seperti memberikan penyuluhan, kampanye media, terapi medis serta rehabilitasi.



1. Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses penyampaian informasi mengenai akibat dari pergaulan bebas kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengubah kebiasaan atau perilaku buruk yang sering dilakukan dengan tujuan mengurangi tingkat penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Badung.

2. Kampanye Media

Kampanye media telah dilakukan oleh pihak KPA Kabupaten Badung melalui sosial media, media cetak yang berupa ajakan untuk pemeriksaan diri sedini mungkin untuk pencegahan baik secara secara statis dan *mobile*.

3. Terapi Medis

Terapi medis yang dilakukan KPA Kabupaten Badung dalam rangka kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat terkait penanggulangan HIV/AIDS sekarang ini masih berupa pendampingan saja kalau alurnya penanggulangan hanya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan.

4. Rehabilitasi

Program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS ini bertujuan untuk menanggulangi HIV-AIDS dengan mencegah penularan HIV-AIDS, memutus mata rantai penyebaran HIV-AIDS serta melakukan rehabilitasi hingga pemulihan bagi penderita HIV-AIDS sehingga dapat kembali beraktivitas di lingkungan masyarakat.

d. Letak pengambilan keputusan.

Keputusan yang diambil oleh KPA Kabupaten Badung dalam penanggulangan HIV-AIDS melibatkan masyarakat dan LSM dalam pengambilan keputusan. Usulan yang disampaikan oleh LSM dan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS ditunjukkan dengan adanya keterlibatan kerja terkait karakteristik pribadi serta sifat dari tugas yang dapat meningkatkan faktor sosial.

f. Sumber daya yang dilibatkan.

Sumber daya yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu KPA Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan, lembaga masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari pihak yang terlibat guna mensukseskan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung adalah sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adanya keterbukaan informasi publik disampaikan oleh pihak lembaga sosial masyarakat dan dukungan partisipasi

masyarakat dalam mencapai keberhasilan implementasi program yang telah dicanangkan oleh KPA Kabupaten Badung.

- b. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
Karakteristik dari KPA Kabupaten Badung dengan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program yang telah dicanangkan dan bekerja sama dengan pihak lembaga sosial masyarakat. Adanya komitmen dalam rangka kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat terkait penanggulangan HIV/AIDS pihak KPA Kabupaten Badung memiliki komitmen secara tertulis sesuai dengan visi dan misinya menekan laju perkembangan HIV/AIDS di Kabupaten Badung.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang informasi penanggulangan HIV-AIDS. Sehingga untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Dalam proses kerjasama penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Badung masih ada beberapa hal yang terjadi antara lembaga terkait termasuk LSM yang masih kurang aktif memberikan pemberian informasi yang dapat dilihat bahwa masyarakat yang kurang paham akan legitimasi LSM ataupun lembaga terkait karena masih kurangnya sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat tentang penanggulangan penyakit HIV/AIDS.

Kendala Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum dapat berjalan dengan maksimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Kurang Intensifnya Sosialisasi Tentang Informasi Penanggulangan HIV-AIDS
Sosialisasi yang dilakukan kurang intensif, menyebabkan belum semua masyarakat memahami informasi mengenai HIV-AIDS. Kegiatan sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan hanya diikuti oleh beberapa perwakilan masyarakat sehingga informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya sampai di masyarakat. Informasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS belum sepenuhnya sampai dimasyarakat. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui informasi penanggulangan HIV-AIDS, hal ini karena kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan oleh KPA Kabupaten Badung.
- b. Kurangnya Kader Pemberdayaan Masyarakat
Adanya kesulitan dalam pembinaan kader posyandu yang bersedia membagikan informasi terkait penanggulangan HIV-AIDS serta minimnya SDM yang bersedia menjadi kader posyandu menyebabkan penyampaian informasi tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan akses informasi bagi masyarakat tentang penanggulangan HIV-AIDS.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum dapat terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penanggulangan HIV-AIDS. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu: kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung dan kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kader posyandu).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Azza, et al. 2015. Health Empowerment, and Economics of Women with HIV/AIDS Through Life Skills Education. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. <http://e-journal.unair.ac.id>
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Situasi HIV dan AIDS di Indonesia. 2007. Jakarta
- Konsep HIV/AIDS Seksualitas & Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Buku Mahasiswa Kesehatan.
- Kambu, Y. 2012. Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Tindakan Pencegahan Penularan HIV Oleh Odha Disorong. Fakultas Ilmu Kesehatan Iniversitas Indonesia Depok.
- Katiandagho, D. 2015. Epidemiologi HIV/AIDS. Bogor: Penerbit In Media.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hardiyani, S.P. 2015. Resiliensi Pada Orang Dengan HIV/AIDS. Fakultas Psikologi Unoversitas Semarang. <http://ilib.usm.ac.id>
- Noviana, N. 2016.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.